

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut (Pramitha, 2020) teori keagenan adalah hubungan kontraktual hukum antara pemegang saham dan manajemen. Dalam hubungan ini seringkali konflik muncul karena perbedaan kepentingan. Menurut (Rahayu et al., 2018) *agency theory* mendeskripsikan hubungan antara agen dengan pimpinan. Teori keagenan adalah contoh bagaimana pengendalian diri tata kelola perusahaan yang baik dapat menghilangkan manajemen laba. Pengelolaan laba oleh manajemen dapat diminimalkan melalui pemantauan yang menyelaraskan kepentingan pemilik dan pengelola.

Menurut (Zurriah, 2017) teori keagenan berkaitan dengan fakta bahwa kepemilikan perusahaan terpisah dari manajemennya. Pemilik menjadi pemodal bisnis dan mendelegasikan wewenang manajemen kepada manajer profesional. Ini memberikan administrator kontrol penuh atas penggunaan sumber daya perusahaan. Dengan cara ini, manajemen lebih mengetahui cakupan perusahaan dan prospek jangka panjang daripada pemilik (pemegang saham). Masalah agensi muncul karena perilaku-perilaku agen oportunistik adalah perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

2.1.2 Manajemen Laba

Menurut (Dwiharyadi, 2017) mengungkapkan bahwa manajemen laba merupakan suatu proses pada mana para manajer memiliki kemampuan buat memakai deskresi yang dimiliki buat menyesatkan *stakeholder* atau memengaruhi hasil menurut kontraktual mereka dengan *owner*. Menurut (Widianjani & Yasa, 2020) manajemen laba merupakan suatu kemampuan yang dipakai buat mengganti *financial statement*, syarat upaya ekonomi emiten atau buat memengaruhi *output* hasil kontraktual yang berkaitan dalam nomor akuntansi yang sudah dilaporkan.

Menurut (Putra et al., 2018) manajemen laba adalah keputusan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka meningkatkan laba atau mengurangi kerugian yang dilaporkan. Banyak yang menganggap manajemen pendapatan sebagai perilaku negatif, karena informasi keuangan yang ditampilkan tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Menurut (Pramitha, 2020) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba akan meningkatkan penyimpangan laporan keuangan dan akan mengganggu kepercayaan pengguna laporan keuangan bahwa data laba yang dirancang adalah data laba yang tidak dirancang. Adapun rumus manajemen laba yang digunakan mengacu pada jurnal penelitian (Pernamasari & Mu'minin, 2019) sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Manajemen Laba} = \frac{\text{Akrual modal kerja (t)}}{\text{Penjualan periode (t)}}} \quad \text{Rumus 2.1 Manajemen Laba}$$

$$\text{Akrual modal kerja} = \Delta \text{AL} - \Delta \text{HL} - \Delta \text{Kas}$$

Keterangan:

ΔAL = Perubahan aktiva lancar pada periode t

ΔHL = Perubahan hutang lancar pada periode t

ΔKas = Perubahan kas dan setara kas pada periode t

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Menurut (Rasubala & Rate, 2020) kepemilikan adalah proses yang dirancang untuk meminimalisir konflik kepentingan antara direktur perusahaan dan pemegang saham. Kepemilikan digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara informasi perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal. Struktur kepemilikan menurut (Franita, 2018:14) yaitu komparasi total saham yang dimiliki oleh internal dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Struktur kepemilikan digunakan untuk menggambarkan bagian terpenting dari struktur modal. Beberapa peneliti percaya bahwa struktur kepemilikan dapat mempengaruhi cara perusahaan dikelola, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

2.1.3.1 Kepemilikan Institusional

Menurut (Dwijayanti & Suryanawa, 2017) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham milik negara, lembaga keuangan, korporasi, lembaga asing, dana perwalian dan lembaga lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional adalah kepunyaan saham di perusahaan lain, kepemilikan perusahaan, bank atau lembaga lain. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan investor institusional, mengurangi kejahatan administratif, dan menurunkan nilai perusahaan. Investor institusional yang

memegang ekuitas dalam jumlah besar akan memiliki insentif yang kuat untuk mengumpulkan informasi, memantau perilaku manajemen, dan meningkatkan kinerja yang lebih baik.

Kepemilikan institusional menurut (Pramitha, 2020) memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Profesionalisme pada analisis data maka mampu menguji validitas informasi.
2. Mempunyai motivasi kuat pada lebih banyak pengawasan kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan.

(Sulistyoningsih & Asyik, 2019) Mendefinisikan kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas sejumlah saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi, seperti saham pada bank, institusi lain, perusahaan asuransi, atau perusahaan investasi. Kepemilikan institusional dapat diukur sebagai proporsi saham yang menjadi kepemilikan perusahaan atau investor institusional dari seluruh sisa saham. Saham merupakan sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan sebaliknya, memasukkan investor institusional dapat meningkatkan pemantauan kinerja yang optimal.

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Rumus 2.2 Kepemilikan Institusional

2.1.4 Good Corporate Governance

Menurut (Sudarmanto et al., 2021:3) tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manajemen. Kelompok pemangku kepentingan di luar dan dalam emiten terkait dengan hak dan kewajiban yang bisa

memberikan nilai tambahan bagi bisnis, pemegang saham, karyawan, pemerintah, kreditur, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menambah nilai bagi pemegang saham dan semua pemangku kepentingan utama yang terkait dengan perusahaan, termasuk pemberi pinjaman, pemasok, asosiasi perdagangan, konsumen, pekerja, dan pemerintah dan seluruh masyarakat. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk menciptakan nilai. Hal ini dirangkaikan bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai sarana implementasi untuk mencapai kinerja yang sehat.

Dalam pedoman umum GCG telah di atur, berikut prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik adalah:

1. Keadilan

Emiten diharapkan bertindak setara serta adil dalam melakukan kegiatannya terhadap pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

2. Transparansi

Informasi yang diberikan oleh lembaga penyiaran pendukung sasaran harus relevan, mudah dipahami dan dimengerti oleh pemangku kepentingan.

3. Akuntabilitas

Prinsip ini berlaku untuk tanggung jawab “pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya” terhadap perusahaan. Perusahaan diharapkan melakukan pekerjaannya secara terbuka dan jujur.

4. Pertanggungjawaban

Perusahaan diharapkan mengikuti aturan yang ada. Perusahaan juga mengharapkan tanggung jawab perusahaan atau pemegang saham dalam hal sosial, etika bisnis yang baik menjadi prioritas.

5. Indenpedensi

Perusahaan harus dijalankan secara mandiri sehingga masing-masing badan atau bagian dari perusahaan tidak memiliki kendali atas yang lain maupun pihak lain tidak dapat campur tangan.

Menurut forum *for Corporate Governance* di Indonesia tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur organisasi dan hubungan perusahaan, bersama dengan hak dan kewajiban antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya (Rahma Febrina et al., 2018). Tata kelola perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan memantau atau mengendalikan kinerja manajemen dan meminta pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham sesuai dengan kerangka peraturan.

(Kumaat, 2012:22) Klaim GCG dapat dilihat dari 3 hubungan pemangku kepentingan yaitu:

1. Hubungan antar pemangku kepentingan internal (BOD, manajemen, staf) perusahaan.
2. Hubungan antara perusahaan (diwakili oleh BOD) dan dewan komisaris (*Boards of Commissioners* dan para pemegang saham/*shareholders* yang terutang dalam RUPS).

3. Hubungan antara perusahaan dengan semua pemangku kepentingan, yaitu internal dan semua pemangku kepentingan seperti *customer*, *supplier*, *creditor*, asosiasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat.

2.1.4.1 Komisaris Independen

Menurut (Cahyadi & Mertha, 2019) komisaris independen adalah orang yang mengevaluasi keputusan dewan direksi dan memiliki kendali langsung atas kinerja perusahaan. Menurut (Pramono, 2020) dewan komisaris adalah badan perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh atas pengelolaan perusahaan. Fungsi dewan komisaris antara lain komisaris independen, mengawasi direksi dalam mencapai tujuan perusahaan dan memberhentikan sementara direksi jika diperlukan.

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{total komisaris}}$$

Rumus 2.3 Komisaris Independen

2.1.4.2 Komite Audit

Menurut (Hasnati, 2014:165) komite Audit adalah komite profesional dan independen yang terdiri dari komite-komite. Peran komite pengendalian internal adalah untuk mendukung dan memperkuat peran komite yang mengawasi proses akuntansi. Menurut (Lastanti, 2019) komite audit yakni sebuah komite yang dibuat oleh dewan sebagai tugas pengawasan bagi emiten. Komite audit mempunyai peran khusus dalam pemantauan dari aspek organisasi, maka keberadaan komite audit sudah diatur pemerintah yakni mewajibkan emiten memiliki komite audit.

Komite audit berperan penting dan strategis dalam menjaga sistem audit perusahaan, menjaga kepercayaan dalam proses pelaporan keuangan. Tanggung Jawab sebagai komite audit bisa membantu proses kerja, masing-masing proses kontrol laporan keuangan untuk manajemen. Peran komite berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan dalam tugasnya mengawasi proses akuntansi oleh manajemen. Dengan adanya pengawasan komite audit kemudian informasi yang disajikan dalam laporan informasi keuangan lebih informatif dan berkualitas.

$$KA = \sum \text{Anggota Komite audit}$$

Rumus 2.4 Komite Audit

2.1.4.3 Dewan Direksi

Menurut (Muhammad & Pribadi, 2020) direksi adalah suatu badan usaha yang fungsi utamanya bertanggung jawab dan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam rangka mencapai tujuan usaha. Menurut (Kuswiratmo, 2016:22) tugas dewan direksi adalah meninjau kinerja manajemen untuk memastikan operasi normal perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengatur perusahaan dan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawabnya kepada anggota atau investornya.

$$DD = \sum \text{Anggota Dewan Direksi}$$

Rumus 2.5 Dewan Direksi

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Zurriah, 2017) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, Arus Kas Bebas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Praktek Manajemen Laba hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, arus kas bebas, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan mempengaruhi keuntungan nyata manajemen. Secara parsial, tidak ada yang signifikan mempengaruhi keuntungan nyata, tetapi *leverage* memiliki positif dan signifikan bagi manajemen keuntungan nyata.

(Dwiharyadi, 2017) penelitian tentang Pengaruh Keahlian Akuntansi dan Keuangan, Komite Audit dan Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba hasil penelitian menunjukkan anggota komite audit dan anggota dewan komisaris yang memiliki pengalaman akuntansi atau keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

(Dwijayanti & Suryanawa, 2017) berjudul Pengaruh Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba hasil penelitian menyatakan asimetri informasi berpengaruh positif pada manajemen laba, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba.

(Cahyadi & Mertha, 2019) dalam judul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba hasil analisis yaitu GCG maupun ukuran perusahaan berpengaruh pada manajemen laba.

Penelitian (Mahadewi & Krisnadewi, 2017) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Independen pada Manajemen Laba hasil analisis menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan pada manajemen laba.

(L. Mamu & Eka Damayanthi, 2018) Dengan judul Moderasi Kualitas Auditor terhadap Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh positif pada manajemen laba, kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada manajemen laba.

Penelitian (Widianjani & Yasa, 2020) berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba Oleh CEO Baru pada Perusahaan Manufaktur bahwa hasil penelitian menunjukkan *good corporate governance* memiliki pengaruh yang negatif pada manajemen laba.

Penelitian oleh (Putra et al., 2018) berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen

laba, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

(Pramitha, 2020) berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris dan Jenis Kepemilikan terhadap Manajemen Laba hasil analisis menyatakan jenis kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, sedangkan struktur kepemilikan, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

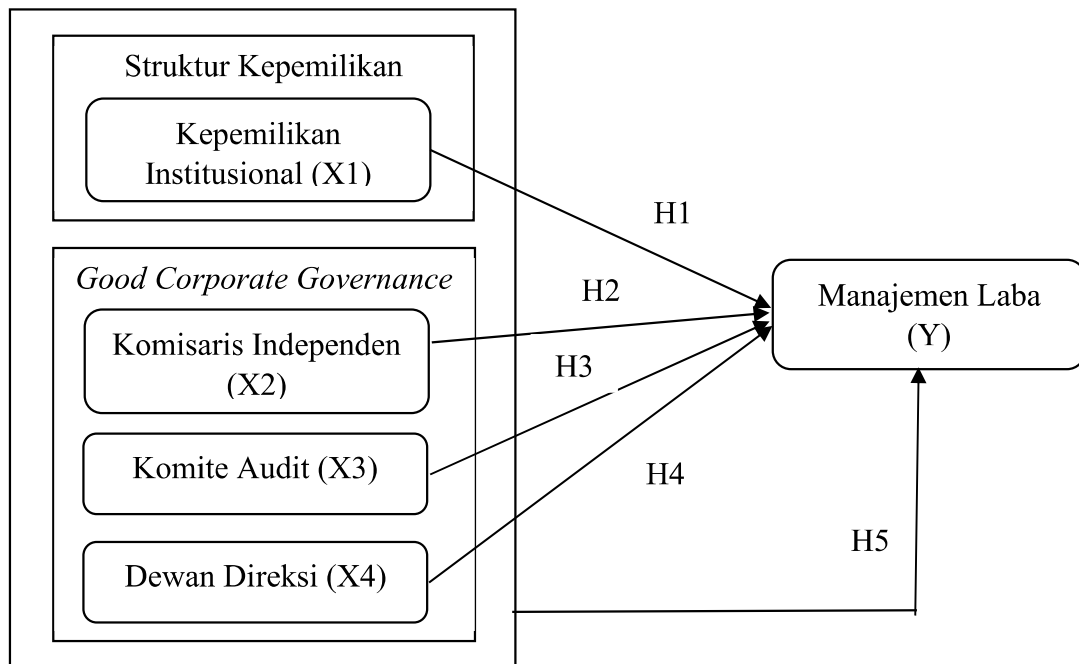
(Banjarnahor & Yando, 2018) judulnya Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi Hasil menunjukkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh struktur kepemilikan pada manajemen laba. Sebuah bisnis dijalankan oleh manajer profesional yang diberi kompensasi atau kompensasi untuk melakukan bisnis untuk kepentingan pemilik, bukan pemilik. Hal ini menyebabkan masalah kelembagaan dan asimetri informasi. Masalah keagenan muncul ketika manajer tidak selalu bertindak untuk kepentingan pemiliknya.

Pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba. Manajemen laba dapat dikurangi dengan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin banyak kontrol yang dimiliki perusahaan, semakin kecil kemungkinan manajemen akan

mengelola pendapatannya. Pengawasan yang dapat diperoleh melalui tata kelola perusahaan yang baik meliputi auditor independen, komite audit dan dewan direksi.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti berhipotesis:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₂: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₃: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₄: Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₅: Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.